



REALISASI DANA 12 M TANGANI COVID-19 DIMINTA TERBUKA

Lolong : Ini Uang Rakyat, Bukan Pribadi

MINUT-- Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Coronavirus atau Covid 19 di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berjumlah sebesar Rp12 miliar. Angka ini bukan sedikit, dalam rapat pembahasan pergeseran anggaran antara Pemkab dan DPRD terkait rasionalisasi pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di Gedung Tumatenden, Sabtu (28/3) telah disepakati untuk jumlah tersebut.

Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan, total Rp12 miliar berdasarkan 2 kali tahapan permintaan anggaran dari Pemkab Minut.

Pertama, surat Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan tanggal 24 Maret Nomor: 49/ASS II/III/2020 yang ditandatangani oleh Asisten II Allan Mingkid ditujukan kepada pimpinan DPRD Minut senilai Rp4 miliar.

Dan kedua, surat Bupati Minahasa Utara tanggal 28 Maret 2020, terkait tambahan pengajuan anggaran sebesar Rp8 miliar.

Sumber dananya dari rasionalisasi anggaran di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Sekretariat DPRD Minut.

"Berapapun yang akan diambil dari DPRD kami tetap setuju, asalkan semua pergeseran anggaran dari APBD tahun 2020 ini, dipergunakan untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Minahasa Utara



Denny Lolong

sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri," terang Delon, sapaannya.

Ketua DPC PDIP Minut Ini memperingatkan anggaran penanganan Covid 19 hanya digunakan instansi teknis yaitu Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan RSUD Maria Walanda Maramis serta ketersediaan pangan akibat dampaknya.

Dikatakan Denny Lolong, anggaran ini telah dipakai sejak pertama kali Bupati Vonnie Anneke Panambunan melakukan aksis sosial membagikan hand sanitizer, masker dan cairan disinfektan.

"Semua yang sudah dilakukan Pemkab, termasuk yang sudah dibagi-bagikan bupati semua adalah uang rakyat, yang kami setuju. Karena ini uang rakyat Minut bukan uang pribadi, jadi kami DPRD Minut berharap



Azhar

masyarakat mengawasi juga apa yang dilakukan Pemkab dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Minut," imbuh Delon, Sabtu (28/3).

Sementara itu, sejumlah aktivis maupun pemerhati pemerintahan Minut ikut memberikan tanggapan terkait dana tersebut.

"Pemerintah Minut harus secara transparan memberikan pernyataan. Memang masyarakat pasti dalam suasana begini tidak akan mempertanyakan Bantuan yang diterima baik uang maupun barang sumbernya dari mana? Tapi menjadi menarik pernyataan Ketua DPRD, semua yang dilakukan Pemkab, termasuk yang sudah dibagi-bagikan bupati semua uang rakyat (APBD). Ini butuh klarifikasi serta transparansi karena disisi lain selalu disampaikan uang pribadi," terang Denny



Denny Wowiling

Wowiling politisi Partai Golkar, yang juga mantan Pimpinan DPRD Minut, periode yang lalu. Hal yang sama juga diungkapkan Azhar, Anggota DPRD Minut Komisi I. Menurutnya, waduh kalau begini urusannya bisa jadi kacau ini.

"Yang saya pahami mengenai bagi-bagi sinitizer, masker, dan uang oleh Ibu Bupati beberapa waktu ini pake duit pribadi. Kalau benar pakai APBD, harusnya lebih terstruktur dan tidak pakai embel-embel sticker. Memang belum saatnya dimintai pertanggungjawaban, tapi kalau dalam pelaksanaannya ini sudah lebih awal diketahui bahwa penggunaan APBD dalam penanganan covid 19 dibarengi dengan upaya kampanye, rakyat dan kita semua bisa segera menyikapi dengan teguran," tegas Azhar, kemarin. (fjr)